

DETERMINAN KESEDIAAN NELAYAN MENGAGUNKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN

Mahpud^{*)1}, Satyawan Sunito^{**}, dan Idqan Fahmi^{***})

^{*)} Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.68, Karawang 41312

^{**}) Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Jl. Raya Darmaga, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

^{***}) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Gedung FEM Lantai 2, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

ABSTRACT

This study aimed to analyze factors which influence or encourage the fishermen as the participants in land right certification program to be willing to secure their land certificate to obtain loans and to analyze the impact of land certification program for the fishermen to increase their income and welfare. The study was conducted in Indramayu as an area which has a fisherman land certification program. The data obtained in this study were analyzed by logistic regression and multiple linear regression. The logistic regression analysis was performed by using feasibility test model (goodness of fit) and Nagelkerke R Square Coefficient. Moreover, the multiple linear regression analysis was performed by using F Test and determination coefficient analysis (R^2). The results showed that the fishermen status and educational background, land width, ownership of other assets and side business are included as factors that significantly influence the interest to use their land certificate obtained from "Fishermen Empowerment Program and Small-Scaled Fishery Businesses through the Certification of Land Right" as their collateral. The results were supported by highlighting that p-value for each variable is smaller than 0,10 and the educational factor has a significant effect which is higher than 0,009 compared to other factors. Having a higher education level encourages the fishermen to secure their land certificates in order to obtain capital in increasing their income and welfare.

Keywords: logistic regression, fishermen, income, land certificate, welfare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi atau mendorong nelayan yang merupakan peserta program sertifikasi hak atas tanah bersedia untuk mengagunkan sertifikat hak atas tanah untuk mendapatkan pinjaman dan menganalisis dampak program sertifikasi tanah nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Penelitian dilakukan di Indramayu yang merupakan wilayah yang dijadikan program sertifikasi tanah nelayan. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan regresi logistik dan regresi linier berganda. Analisis regresi logistik menggunakan uji kelayakan model (goodness of fit) dan Koefisien Nagelkerke R Square. Analisis regresi linier berganda menggunakan Uji F dan analisis koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan status nelayan, pendidikan, luas tanah, memiliki aset lain dan usaha sampingan adalah faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanah yang di peroleh dari "Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah". Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai p-value untuk setiap variabel lebih kecil dari 0,10 dan faktor pendidikan mempunyai pengaruh signifikansi yang lebih tinggi 0,009 dibanding faktor lainnya. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu mendorong nelayan untuk menjaminkan/mengagunkan sertifikat hak atas tanah dalam rangka mendapatkan modal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Kata kunci: regresi logistik, nelayan, pendapatan, sertifikat tanah, kesejahteraan

¹ Alamat Korespondensi:

Email: mahpud.foed@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki laut dengan luas wilayah laut 5,8 juta km² dan panjang pantai mencapai 95.181 km serta jumlah pulau yang banyak sehingga memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Dengan potensi perikanan dan kelautan yang besar tersebut, menyadarkan pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai basis dan motor penggerak pembangunan nasional. Terkait dengan perikanan, Indonesia juga memiliki potensi lahan budi daya perikanan yang mencapai 51.876.776 ha yang terdiri dari potensi lahan budi daya tambak sebesar 1.224.000 ha, kolam 526.000 ha, perairan umum 20.173.776 ha, sawah 5.953.000 ha dan potensi lahan budi daya laut sebesar 24.000.000 ha (Sekjen KKP, 2011). Namun, motor penggerak pembangunan nasional tersebut hingga saat ini belum mampu menyejahterakan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Hal ini terbukti dari kondisi nelayan yang identik dengan kemiskinan, dan kenyataan yang kita jumpai saat ini memperlihatkan bahwa penduduk miskin di daerah pesisir dan pedesaan mencapai 63,47%, serta upah riil harian nelayan yang jauh lebih rendah dari upah buruh bangunan.

Kemiskinan tersebut pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan keterampilan dan teknologi, lemahnya akses terhadap permodalan, belum adanya insentif moneter bagi nelayan, rantai tata niaga yang merugikan (*patront-client*), nelayan tidak mempunyai aset sebagai modal aktif, dan minimnya perlindungan sosial, usaha yang sangat ditentukan oleh alam dan yang lainnya. Berbagai faktor tersebut, pada akhirnya berakibat pada rendahnya dan tidak efisiennya produktivitas nelayan.

Salah satu penyebab lemahnya akses nelayan kecil terhadap permodalan adalah tidak dimilikinya aset yang dapat diagunakan untuk memperoleh kredit. Aset berupa tanah yang dimiliki nelayan umumnya belum memiliki kekuatan hukum, karena belum bersertifikat, sehingga hanya menjadi modal mati (*dead capital*), karena tidak *bankable* (De Soto, 2000). Kondisi tersebut malah sering dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk membuat sistem ketergantungan yang kuat secara sosial dan ekonomi sehingga semakin mempersulit nelayan untuk memperoleh pendapatan yang layak dan untuk meningkatkan kesejahteraannya, sebagai akibat nelayan yang tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga penjualan ikan. Pada dasarnya, dalam rangka

mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar nelayan memiliki kemandirian dalam ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah, diantaranya adalah melakukan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan mengadakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun, program-program tersebut masih belum mampu menyelesaikan masalah modal nelayan. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPN mencoba lagi meluncurkan satu program yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan dan meningkatkan pemberdayaan para nelayan melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah.

Pilot project program sertifikasi tersebut, dilaksanakan tahun 2009 di lima provinsi, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan target sebanyak 1.500 bidang yang terbagi secara merata sebanyak 300 bidang di masing-masing provinsi. Terkait hal tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI, telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah 1.499 bidang (99,93 %) dari target yang ditetapkan sebanyak 1.500 bidang. Sisanya sebanyak satu bidang yang berada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur tidak dapat diproses sertifikasi hak atas tanahnya karena tanah dalam sengketa.

Khusus di Provinsi Jawa Barat, wilayah yang mempunyai jumlah nelayan paling banyak berada di Kabupaten Indramayu. Adapun jumlah nelayan yang terdapat di Kabupaten Indramayu, berjumlah 44.515 orang atau 42,92 % dari total nelayan di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, pada tahun 2009, Indramayu dijadikan lokasi Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah. Target sertifikasi hak atas tanah yang ditetapkan di Indramayu juga terealisasi 100% sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepastian usaha nelayan untuk mengakses permodalan. Namun demikian, apakah program tersebut benar-benar dapat meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, hingga saat ini masih belum ada kajian ilmiah terkait hal tersebut. Mengingat kajian yang ada terkait dengan tanah lebih pada aspek mengkaji dampak program sertifikasi masal untuk pengembangan UKM (Abdullatif, 2005), pengaruh sertifikat hak atas tanah pada kinerja ekonomi UKM (Mesman, 2008), dampak program sertifikat hak atas tanah terhadap akses kredit dan peningkatan pendapatan, permasalahan dalam pengelolaan tanah (Hartmann dan Spit, 2015),

land tenure reforms dan *land markets* (Holden dan Otsuka, 2014), distribusi kepemilikan tanah (Keswell dan Carter, 2014), analisis spasial dan temporal tanah berdasarkan nilainya (Lin dan Zhu, 2014), hubungan antara politik dengan tanah di daerah urban (Markussen dan Tarp, 2014), pengaturan dalam pengembangan lahan pribadi (Morshed dan Asami, 2015), dampak dari pengembangan institusi dan sosial ekonomi terhadap pengembangan penggunaan lahan (Niedertscheider *et al.* 2014), perencanaan penggunaan lahan (Ninkya, 1998), konflik penggunaan lahan (Pacione, 2013), sedangkan penelitian ini berbeda dengan yang sudah dilakukan karena mengkaji mengenai dampak program sertifikasi tanah nelayan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesediaan nelayan peserta program untuk mengagunkan atau menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Menurut Midgley (1995) keadaan manusia yang baik atau sejahtera apabila masalah-masalah sosial terkendali, kebutuhan-kebutuhan manusia terpenuhi, dan kesempatan-kesempatan sosial dimaksimalkan. Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan.

Golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi, dan pendidikan yang rendah, dapat memperbaiki kesejahteraan mereka dengan peningkatan pendapatan mereka (Todaro, 2003). Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan meningkatkan pendapatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Eretankulon Kecamatan Kandanghaur dan Desa Benda di Kecamatan Karangampel. Waktu penelitian bulan November 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dengan metode survei, dengan didukung metode kualitatif untuk mendapatkan informasi yang tidak mudah diukur. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara

langsung dari masyarakat (nelayan) dan dari informan kunci seperti keterangan dari Kantor Desa, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu dan perbankan, dengan menggunakan metode wawancara terstruktur guna mendukung metode kuesioner yang terdiri dari daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Data sekunder, yaitu data monografi nelayan peserta Program Sertifikasi Hak Atas Tanah tahun 2009, jumlah sertifikat hak atas tanah nelayan telah atau belum yang diagunkan pada perbankan, pendapatan nelayan sebelum dan setelah mengikuti program dan data-data lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel, yaitu Nelayan peserta program Pensertifikatan Hak Atas Tanah Nelayan tahun 2009 yang berdomisili di Desa Benda Kecamatan Karangampel dan Desa Eretankulon Kecamatan Kandanghaur dengan jumlah sampel nelayan sebanyak 100 responden sehingga teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *sampling* jenuh (teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel). Selain itu juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, Pegawai Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, Kepala Bagian Kredit Perbankan, Kepala Desa, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan, dan orang kompeten lainnya.

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang memengaruhi nelayan peserta program mengagunkan/menjaminkan sertifikat hak atas tanah untuk memperoleh pinjaman modal, adalah status berdasarkan stratifikasi, usia, tingkat pendidikan, usaha sampingan, jumlah keluarga (berkaitan dengan kebutuhan biaya dalam satu keluarga), aset lain yang dimiliki selain tanah/bangunan, luas tanah yang dimiliki.
- Mengagunkan/menjaminkan sertifikat hak atas tanah berpengaruh terhadap pendapatan nelayan peserta program.

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan regresi logistik dan regresi linier berganda, dengan menggunakan bantuan *software*. Regresi logistik digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi seorang nelayan peserta program bersedia mengagunkan/menjaminkan sertifikat hak

atas tanahnya untuk mendapatkan modal dari pihak perbankan, dan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah program sertifikasi hak atas tanah nelayan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi nelayan peserta program. Analisis regresi logistik menggunakan uji kelayakan model (*goodness of fit*) untuk memastikan tidak adanya kelemahan atas kesimpulan dari model regresi logistik yang diperoleh, dan Koefisien Nagelkerke *R Square* untuk mengetahui kontribusi pengaruh dari faktor yang bisa memengaruhi nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya. Analisis regresi linier berganda menggunakan Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat dan analisis koefisien determinasi (R^2) untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas.

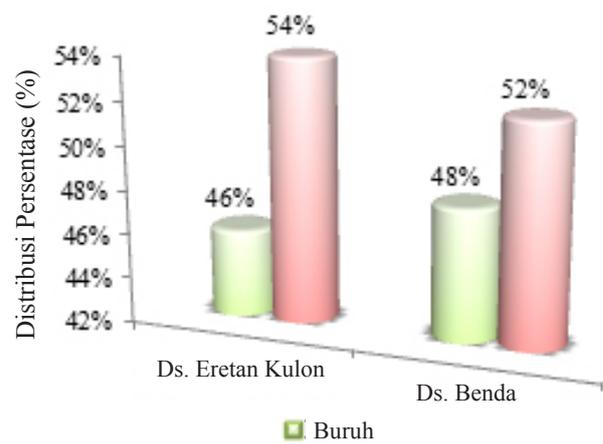
HASIL

Karakteristik Responden

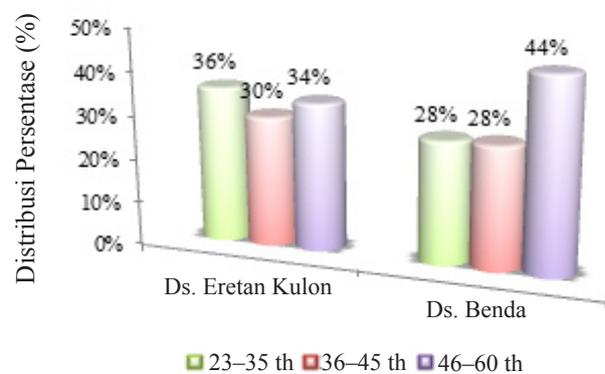
Mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon merupakan nelayan pemilik dengan persentase sebanyak 54%, sedangkan 46% sisanya merupakan nelayan buruh. Selanjutnya mayoritas nelayan di Desa Benda merupakan nelayan pemilik dengan persentase sebanyak 52%, sedangkan 48% sisanya merupakan nelayan buruh (Gambar 1).

Pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon berusia antara 23-35 tahun dengan persentase sebanyak 36%, sebanyak 34% lainnya berusia antara 46-60 tahun dan 30% sisanya merupakan nelayan yang berusia antara 36-45 tahun. Pada nelayan di Desa Benda, didominasi oleh nelayan yang berusia antara 46-60 tahun dengan persentase sebanyak 44%, sedangkan 28% masing-masing sisanya berusia antara 25-35 tahun dan 36-45 tahun.

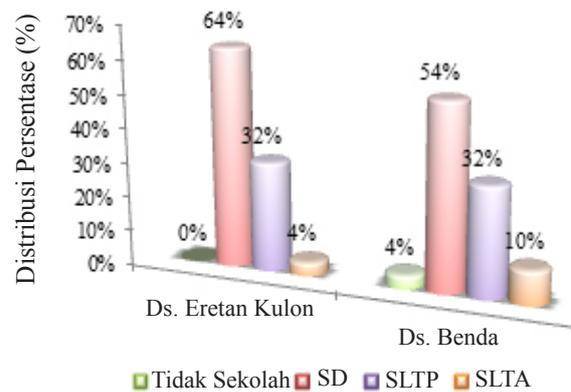
Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon merupakan lulusan SD dengan persentase sebanyak 64%, lulusan SLTP 32% dan sebanyak 4% merupakan lulusan SLTA. Begitupula pada Desa Benda didominasi oleh nelayan yang merupakan lulusan SD dengan persentase sebanyak 54%, lulusan SLTP sebanyak 32%, sebanyak 10% lainnya merupakan lulusan SLTA dan 4% sisanya tidak menenyam pendidikan.



Gambar 1. Profil responden berdasarkan status nelayan



Gambar 2. Profil responden berdasarkan usia



Gambar 3. Profil responden berdasarkan tingkat pendidikan

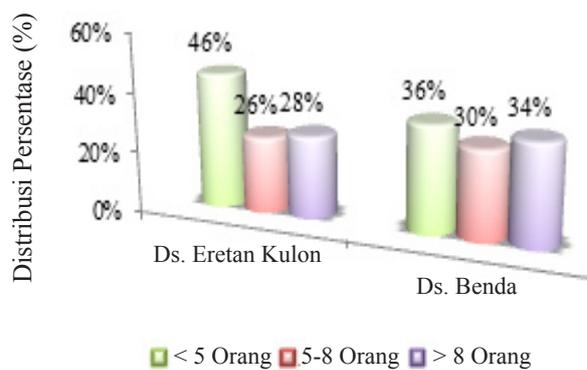
Mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon memiliki anggota keluarga < 5 orang dengan persentase sebanyak 46%, sebanyak 28% lainnya memiliki jumlah anggota keluarga > 8 orang, sedangkan 26% sisanya memiliki anggota keluarga 5-8 orang. Begitupula pada nelayan di Desa Benda, mayoritas dari nelayan memiliki anggota keluarga < 5 orang dengan persentase sebanyak 36%, sebanyak 34% lainnya memiliki anggota keluarga >

8 orang, sedangkan 30% sisanya memiliki anggota keluarga antara 5–8 orang (Gambar 4).

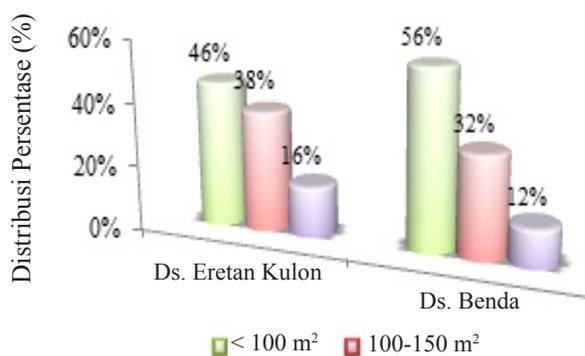
Mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon memiliki tanah kurang dari 100 m² sebanyak 46%, sebanyak 38% antara 100–150 m², sedangkan 16% sisanya memiliki tanah lebih dari 150 m². Pada Nelayan di Desa Benda, sebanyak 50% masing-masing diantaranya memiliki tanah kurang dan lebih dari 100 m² (Gambar 5). Mayoritas nelayan di Desa Benda (74%) memiliki aset lain selain tanah, sedangkan 26% sisanya tidak memiliki aset lain. Namun 50% diantaranya memiliki tanah kurang dan atau lebih dari 100 m² (Gambar 6).

Pendapatan nelayan Desa Benda, mayoritas nelayan di desa tersebut yakni sebanyak 32% memiliki lebih dari 4 juta, 20% pendapatannya Rp3–3,5 juta, 18% pendapatannya Rp2,5–3 juta dan Rp3,5–4 juta dan 12% sisanya berpendapatan Rp2–2,5 juta. Namun setelah dilakukan program sertifikasi tanah nelayan, sebanyak 46% memiliki penghasilan Rp3–3,5 juta, 18% memiliki penghasilan antara Rp2–2,5 juta, 14% lainnya memiliki penghasilan antara Rp3,5–4 juta, sebanyak 12% memiliki penghasilan antara Rp2,5–3 juta dan 10% sisanya memiliki penghasilan lebih dari Rp4 juta (Gambar 7).

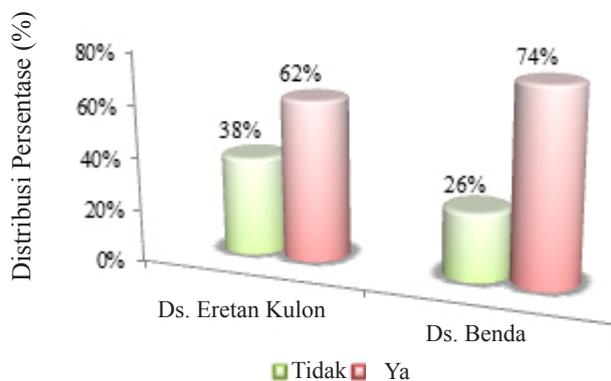
Dalam hal kepemilikan usaha sampingan, mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon (72%) tidak memiliki usaha sampingan, sedangkan 28% sisanya memiliki usaha sampingan. Hal yang mirip juga terjadi di Desa Benda. Dalam hal ini sebanyak 66% tidak memiliki usaha sampingan, sedangkan 34% sisanya memiliki usaha sampingan (Gambar 8).



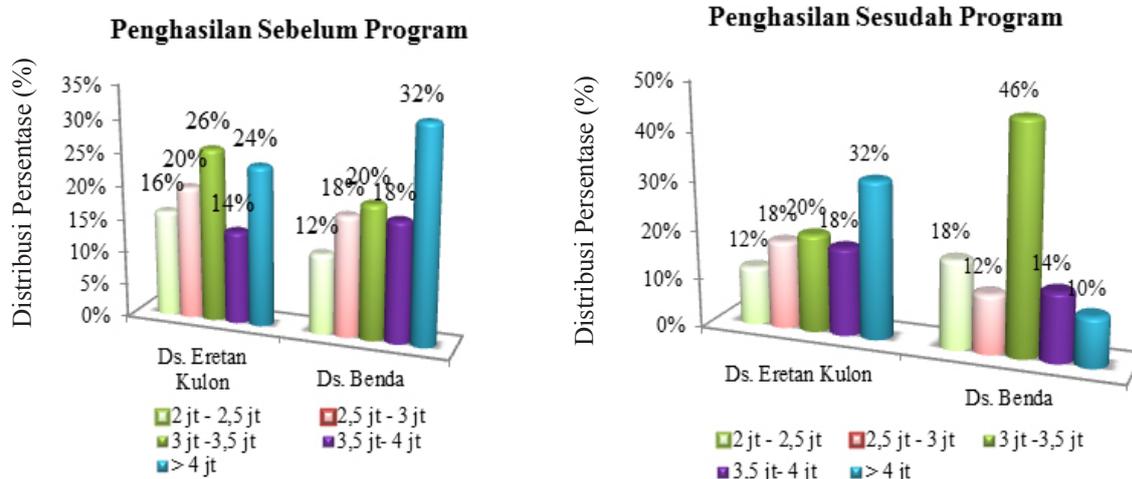
Gambar 4. Profil responden berdasarkan jumlah anggota keluarga



Gambar 5. Profil responden berdasarkan luas tanah yang dimiliki



Gambar 6. Profil responden berdasarkan pemilikan aset lain



Gambar 7. Profil responden berdasarkan penghasilan nelayan sebelum program dan sesudah program

Setelah nelayan di kedua desa memiliki sertifikat hak atas tanah, ternyata mayoritas nelayan di Desa Eretan Kulon (64%) tidak menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya, sehingga hanya 36% yang menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya ke bank. Di Desa Benda, 70% nelayan tidak menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya, dan hanya 30% sisanya yang menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya (Gambar 9).

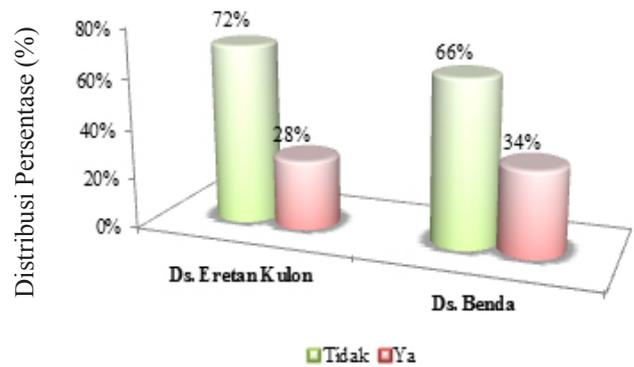
Peningkatan pendapatan nelayan setelah program sertifikasi hak atas tanah nelayan di Desa Eretan Kulon mayoritas nelayan (78%) tidak mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan 22% sisanya mengalami peningkatan pendapatan. Khusus pada nelayan di Desa Benda, mayoritas dari nelayan (70%) tidak mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan 30% sisanya mengalami peningkatan pendapatan (Gambar 10).

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesediaan Nelayan Menjaminkan Sertifikat Hak Atas Tanahnya

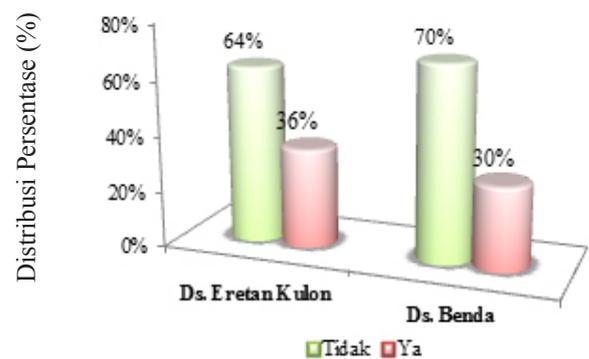
Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien Nagelkerke R^2 adalah 0,557 atau 55,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi sebesar 55,7% dalam memengaruhi nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanah, sedangkan 44,3% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Koefisien Nagelkerke R^2 merupakan nilai yang menunjukkan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam hal ini untuk mengetahui kontribusi pengaruh dari faktor yang bisa memengaruhi nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya. Koefisien Nagelkerke R^2 dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada model regresi linier biasa. Adapun hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil estimasi model regresi logistik seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi pendidikan sebesar 0,099 lebih kecil dari 0,10 (α), dan nilai tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan dalam memengaruhi seorang nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya. Tabel 1 juga memperlihatkan jika nilai *Exp* (B) atau *odd ratio* dari pendidikan adalah yang paling tinggi (3,391), hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan nelayan maka peluang (*odd ratio*) untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya

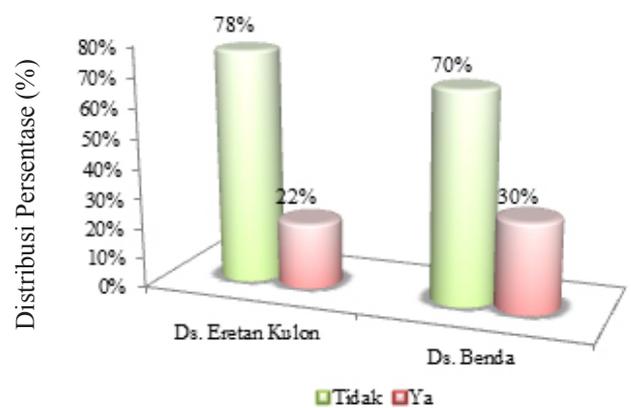
akan meningkat sebesar 3,931 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan dapat memengaruhi pola pikir seorang nelayan untuk melakukan kegiatan bukan hanya sekedar melakukan penangkapan ikan, namun dari wawancara dengan mereka terungkap bahwa kegiatan mengagunkan sertifikat hak atas tanah tersebut ditujukan untuk mendapatkan modal guna pengembangan usahanya.



Gambar 8. Profil responden berdasarkan kepemilikan usaha sampingan



Gambar 9. Profil responden berdasarkan menjaminkan sertifikat hak atas tanah



Gambar 10. Profil responden berdasarkan peningkatan pendapatan

Tabel 1. Nilai taksiran regresi logistik

Variabel	Sig.	Exp(B)/Odd Ratio
Status nelayan	0,099	1,658
Usia	0,173	3,931
Pendidikan	0,009	1,164
Jumlah anggota keluarga	0,654	2,822
Luas tanah	0,018	3,725
Asset lain	0,073	3,373
Usaha sampingan	0,071	0,000
Constant	0,000	2,962
<i>Chi-square</i>	<i>Sig. (Goodness of Fit)</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
7,802	0,453	0,557

Nilai signifikansi yang diperoleh dari usia adalah 0,173 dan untuk jumlah anggota keluarga nelayan adalah 0,654. Keduanya lebih besar dari 0,10 (α), sehingga usia dan jumlah anggota keluarga nelayan tidak berpengaruh signifikan dalam memengaruhi seorang nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya.

Nilai signifikansi untuk status nelayan adalah 0,099 dan lebih kecil dari 0,10 (α) sehingga status nelayan berpengaruh signifikan dalam memengaruhi nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya. Adapun koefisien regresi logistik untuk status nelayan adalah 2,962 sehingga nelayan dengan status pemilik memiliki peluang 2,962 kali lebih tinggi untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya dibanding dengan nelayan buruh.

Nilai signifikansi luas tanah adalah 0,018 dan lebih kecil dari 0,10 (α) sehingga luas tanah berpengaruh signifikan dalam memengaruhi seorang nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya. Besar koefisien regresi logistik untuk variabel luas tanah adalah 2,822 yang menunjukkan bahwa setiap terjadi pertambahan luas tanah yang dimiliki oleh nelayan. Peluang untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya akan meningkat sebesar 2,82 kali.

Nilai signifikansi aset lain 0,073 lebih kecil dari 0,10 (α) sehingga aset lain yang dimiliki oleh nelayan berpengaruh signifikan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya. Adapun besar koefisien regresi logistik untuk aset lain yang dimiliki oleh nelayan adalah 3,725 yang menunjukkan bahwa nelayan yang memiliki aset lain memiliki peluang 2,725 kali lebih tinggi untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya dibanding dengan nelayan yang tidak memiliki aset lain. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa nelayan

yang memiliki aset lain pada umumnya berpendidikan lebih tinggi sehingga memiliki keinginan yang kuat untuk maju, dan hal ini berdampak pada adanya usaha untuk memiliki aset lain.

Nilai signifikansi yang diperoleh dari usaha sampingan adalah 0,071, lebih kecil dari 0,10 (α) sehingga usaha sampingan berpengaruh signifikan dalam memengaruhi seorang nelayan untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya. Adapun nilai koefisien regresi logistik untuk usaha sampingan adalah 3,373 yang menunjukkan bahwa peluang nelayan yang memiliki usaha sampingan 3,373 kali lebih tinggi untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanahnya dibanding dengan nelayan yang tidak memiliki usaha sampingan. Hal ini disebabkan nelayan yang mempunyai usaha sampingan pada umumnya membutuhkan modal yang lebih besar dibanding nelayan yang mempunyai usaha tunggal. Selain hal tersebut, pada observasi di lapang juga terlihat bahwa pada umumnya nelayan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, pada umumnya mempunyai aset lain dan mempunyai usaha sampingan. Oleh karena itu, nelayan tersebut umumnya mempunyai keinginan yang lebih besar untuk mendapatkan modal usaha dengan cara mengagunkan sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya.

Dampak Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah terhadap Peningkatan Pendapatan

Analisis dampak dari program pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui sertifikasi hak atas tanah terhadap peningkatan pendapatan, dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Dengan menggunakan *software* SPSS diperoleh hasil seperti Tabel 2.

1) Koefisien determinasi

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukkan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pada Tabel 2, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,614 atau 61,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui sertifikasi hak atas tanah memberikan kontribusi sebesar 61,4% terhadap peningkatan pendapatan nelayan, sedangkan 38,6% sisanya merupakan kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

2) Uji hipotesis simultan (uji F)

Pengujian signifikansi dampak dari program pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui sertifikasi hak atas tanah terhadap peningkatan akses permodalan, dilakukan pengujian hipotesis simultan (uji F) dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_0 ; $\beta = 0$, artinya program pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui sertifikasi hak atas tanah tidak berdampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

H_a ; $\beta \neq 0$, artinya program pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui sertifikasi hak atas tanah berdampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan sebesar 10% atau 0,10.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai signifikansi < 0.10 (α).
- Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai signifikansi > 0.10 (α).

Pada Tabel 2, dapat dilihat nilai signifikansi yang terdapat pada kolom “Sig (Uji F)” adalah sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,10 (α), maka keputusan pengujian hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Hasil tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui sertifikasi hak atas tanah berdampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

3) Estimasi regresi linier berganda dan uji hipotesis parsial (uji t)

Tabel 2 memperlihatkan estimasi regresi linier berganda dan Uji hipotesis parsial berdasarkan nilai yang terdapat pada kolom “Sig” yang menunjukkan besaran signifikansi untuk setiap variabel penelitian dan koefisiennya. Nilai signifikansi yang diperoleh khusus untuk status nelayan, usia nelayan dan jumlah anggota keluarga nelayan adalah berturut-turut sebesar 0,732; 0,342; dan 0,269. Ketiga nilai tersebut lebih besar dari 0,10 (α). Hal tersebut menunjukkan bahwa status nelayan, usia nelayan dan jumlah anggota keluarga nelayan tidak memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan seorang nelayan.

Tabel 2. Hasil uji analisis regresi linier, dampak program sertifikasi hak atas tanah nelayan terhadap peningkatan pendapatan nelayan

Variabel	Koefisien	Sig.
(Constant)	-1,207	0,000
Status nelayan	0,023	0,732
Usia	0,034	0,342
Pendidikan	0,273	0,000
Jumlah anggota keluarga	0,040	0,269
Luas tanah (m ²)	0,100	0,038
Aset lain yang dimiliki	0,126	0,068
Usaha sampingan	0,145	0,055
Menjaminkan sertifikat tanah	0,173	0,034
<i>R Square</i>	F	Sig (Uji F)
0,614	18,056	0,000b

Nilai signifikansi yang diperoleh untuk tingkat pendidikan adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,10 (α). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan seorang nelayan. Adapun nilai koefisien regresi untuk tingkat pendidikan adalah sebesar 0,273 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh yang terjadi adalah searah. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seorang nelayan, diprediksikan akan mampu meningkatkan pendapatan seorang nelayan.

Faktor pendidikan perlu dimiliki oleh para nelayan, karena dengan memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi maka akan berpengaruh terhadap pola pikir nelayan, sekaligus dapat mewujudkan tujuan program sertifikasi tanah terhadap kesejahteraan nelayan. Selain pendidikan formal harus dimiliki, perlu juga memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan melalui pendidikan nonformal, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengembangan usaha, cara pengolahan sistem pemasaran dan sistem pengelolaan keuangan (permodalan) dengan tujuan dapat mengembangkan usahanya.

Pentingnya pendidikan bukan hanya untuk para nelayan yang saat ini telah menjadi kepala keluarga di masing-masing rumah tangga. Namun demikian, terhadap generasi penerus para nelayan juga perlu diarahkan, ditanamkan dan diberikan dan harus diperolehnya agar dikemudian hari mereka akan menjadi nelayan yang memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya, tidak lagi mereka bafikir sederhana dan tradisional sebagaimana yang dilakukan pendahulunya.

Upaya yang diperlukan dalam rangka mengembangkan sekaligus mewujudkan semua itu maka pemerintah dan seluruh *stakeholder* harus melakukan upaya nyata misalnya penyediaan sarana (tempat) pendidikan baik formal maupun non formal. Sarana pendidikan formal mulai dari Tingkat Sekolah Dasar hingga Menengah Atas perlu adanya penambahan jumlah dan diupayakan lokasinya tidak terlalu jauh dengan lokasi/wilayah sentra nelayan.

Sarana atau tempat bimbingan dan pelatihan diperlukan dalam rangka memberikan bekal pengetahuan dan keahlian nelayan agar mereka dapat mengembangkan

potensi dirinya terkait dengan kegiatan usahanya. Pendidikan formal seperti paket A, B dan C juga perlu lebih disosialisasikan dan diarahkan kepada nelayan yang belum/tidak tuntas mengikuti pendidikan formal oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu agar nelayan dapat mengikuti pendidikan paket A, B dan C tersebut. Selain faktor pendidikan baik formal maupun nonformal, upaya bimbingan dan pendampingan kepada nelayan sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan potensi dan usaha nelayan. Melalui upaya tersebut diharapkan nelayan mampu dan menguasai tentang cara mengembangkan usaha, mengolah hasil usaha, memasarkan serta cara mengakses permodalan, mengelola dan memanfaatkan modal yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan seorang nelayan.

Nilai signifikansi yang diperoleh untuk luas tanah yang dimiliki nelayan adalah sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,10 (α). Hal tersebut menunjukkan bahwa luas tanah yang dimiliki oleh nelayan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan seorang nelayan. Koefisien regresi untuk luas tanah yang dimiliki nelayan adalah sebesar 0,100 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh yang terjadi adalah searah. Dalam hal ini semakin luas tanah yang dimiliki nelayan, diprediksikan akan mampu meningkatkan pendapatan seorang nelayan.

Nilai signifikansi yang diperoleh untuk aset lain yang dimiliki oleh nelayan adalah sebesar 0,068 dan lebih kecil dari 0,10 (α). Hal tersebut menunjukkan bahwa aset lain yang dimiliki nelayan memberi dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan seorang nelayan. Koefisien regresi untuk aset lain yang dimiliki oleh nelayan adalah sebesar 0,126 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh yang terjadi adalah searah sehingga semakin banyak aset lain yang dimiliki seorang nelayan, diprediksikan akan meningkatkan pendapatan seorang nelayan.

Nilai signifikansi yang diperoleh untuk usaha sampingan yang dimiliki nelayan adalah sebesar 0,055 dan lebih kecil dari 0,10 (α). Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha sampingan berdampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan seorang nelayan. Selain hal tersebut, koefisien regresi untuk usaha sampingan yang dimiliki nelayan adalah sebesar 0,126 dan bertanda

positif menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi adalah searah. Oleh karena itu, semakin banyak usaha sampingan yang dimiliki seorang nelayan, diprediksikan mampu meningkatkan pendapatan seorang nelayan.

Implikasi Manajerial

Berdasarkan variabel bebas yang dianalisis dengan menggunakan metode statistik, dapat diketahui bahwa pendidikan, luas tanah, status nelayan, pemilikan aset lain dan mempunyai usaha sampingan sangat berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menjaminkan/mengagunkan sertifikat hak atas tanah.

Selain pendidikan, pengaruh dari menjaminkan atau mengagunkan sertifikat hak atas tanah untuk mendapatkan modal berdampak pada peningkatan pendapatan juga. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti sama dalam setiap keadaan, melainkan baru akan terjadi apabila penggunaan modal yang diperoleh digunakan secara tepat, misalnya membeli alat tangkap baru, memperbaiki alat tangkap yang ada, mengembangkan/membuka usaha lain. Hal tersebut pada umumnya terjadi pada nelayan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga membuat nelayan mempunyai inovasi untuk mengembangkan usahanya sebagai usaha sampingan lain, selain dari usaha penangkapan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak positif untuk memiliki aset lain, selain tanah, dan berbagai hal positif lain yang membuat nelayan menjadi nelayan dengan pendapatan yang lebih besar dibanding dengan nelayan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Oleh sebab itu, agar program sertifikasi tanah nelayan berdampak pada peningkatan pendapatan, terutama pada nelayan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga nelayan dapat memperbaiki kesejahteraannya. Dalam rangka mencapai hal tersebut, nelayan itu sendiri dipandang perlu adanya sebuah upaya untuk memotivasi nelayan mau menjaminkan sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong nelayan mau menjaminkan/mengagunkan sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya, antara lain:

a. Meningkatkan tingkat pendidikan nelayan

Nelayan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempunyai inovasi yang lebih tinggi, dan mempunyai pemikiran yang lebih maju, serta lebih berani mengambil

risiko sehingga keinginan untuk mencoba usaha-usaha lainnya dan mencari modal dengan cara mengagunkan sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya menjadi lebih tinggi. Oleh sebab itu, nelayan dan keluarganya perlu didorong agar dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

b. Pendampingan/bimbingan

Upaya pendampingan/bimbingan perlu dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman manfaat dari sertifikat hak atas tanah selain untuk kepastian hukum. Pendampingan/bimbingan ini juga dapat dilakukan untuk mengarahkan bagaimana cara mendapatkan dan memanfaatkan modal agar lebih tepat guna.

d. Pelatihan dan pendidikan

Upaya ini untuk memberikan dan meningkatkan keahlian dalam mengembangkan/membuka usaha.

e. Fasilitasi

Memfasilitasi nelayan memperoleh kemudahan mendapatkan modal dengan menjaminkan/mengagunkan sertifikat hak atas tanahnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan status nelayan, pendidikan, luas tanah, memiliki aset lain dan usaha sampingan adalah faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menjaminkan sertifikat hak atas tanah yang di peroleh dari "Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah". Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *p-value* untuk setiap variabel lebih kecil dari 0,10 dan faktor pendidikan mempunyai pengaruh signifikansi yang lebih tinggi 0,009 dibanding faktor lainnya.

Dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu mendorong nelayan untuk menjaminkan/mengagunkan sertifikat hak atas tanah dalam rangka mendapatkan modal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan nelayan dapat meningkat seiring dengan meningkatkan pendapatannya dengan menjaminkan sertifikat hak atas

tanah yang dimilikinya apabila pemanfaatannya tepat guna.

Saran

Hasil kesimpulan penelitian terlihat banyak sertifikat hak atas tanah yang belum dimanfaatkan untuk mengakses permodalan maka perlu dilakukan beberapa hal yang disarankan antara lain:

1. Pascaprogram sertifikasi tanah nelayan, kegiatan bimbingan dan pendampingan dapat lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Koordinasi dan komunikasi seluruh *stakeholder* lebih ditingkatkan agar program pascasertifikasi tanah nelayan dapat terwujud.
3. Perlu ada program-program yang dapat mendorong agar nelayan dan keluarganya berupaya untuk meningkatkan pendidikannya sehingga mempunyai inovasi yang lebih tinggi dan lebih berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullatif D. 2005. Dampak program sertifikasi masal terhadap penyerapan modal dalam menunjang pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), studi kasus program sertifikasi masal di Kota Cimahi [tesis]. Bandung: Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), ITB.

De Soto H. 2000. *The Mystery of Capital: Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat*. Jakarta: Qalam Jakarta.

Hartmann T, Spit T. 2015. Dilemmas of involvement in land management – Comparing an active (Dutch) and a passive (German) approach. *Land Use Policy* 42:729–737. <http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.10.004>.

Holden ST, Otsuka K. 2014. The roles of land tenure reforms and land markets in the context of population growth and land use intensification in Africa. *Food Policy* 48:88–97. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.03.005>.

Keswell M, Carter MR. 2014. Poverty and land redistribution. *Journal of Development*

Economics 110: 250–261. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.10.003>.

Lin R, Zhu D. 2014. A spatial and temporal analysis on land incremental values coupled with land rights in China. *Habitat International* 44:168–176. <http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.06.003>.

Markussen T, Tarp F. 2014. Political connections and land-related investment in rural Vietnam. *Journal of Development Economics* 110 (2014): 291–302. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2014.01.011>.

Mesman A. 2008. Analisis Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Terhadap Kinerja Ekonomi Pengusaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Konawe Selatan [tesis]. Bogor: Program Studi Manajemen dan Bisnis Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Midgley J. 1995. *Social Development. The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd.

Morshed MM, Asami Y. 2015. The role of NGOs in public and private land development: The case of Dhaka city. *Geoforum* 60: 4–13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.01.001>.

Niedertscheider M, Kuemmerle T, Muller D, Karl-Heinz E. 2014. Exploring the effects of drastic institutional and socio-economic changes on land system dynamics in Germany between 1883 and 2007. *Global Environmental Change* 28 (2014): 98–108. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.06.006>.

Ninkya TJ. 1998. Land use planning practice under the public land ownership policy in Tanzania. *Habitat International* 23(1): 135–155. [http://dx.doi.org/10.1016/S0197-3975\(98\)00038-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0197-3975(98)00038-1).

Pacione M. 2013. Private profit, public interest and land use planning—A conflict interpretation of residential development pressure in Glasgow's rural–urban fringe. *Land Use Policy* 32(May 2013): 61–77. <http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.09.013>.

Sukirno. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Todaro M. 2003. *Economic Development (8th ed)*. New York and London: Addison Wesley.